STRATEGI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN INDRAGIRI HULU MELAMPAUI RATA-RATA IPM PROVINSI RIAU

Ateng Ariono

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Kabupaten Indragiri Hulu
Jln. Akasia No. 2, Kec. Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29214
E-mail : atengariono@gmail.com (Koresponding)

Abstract: This policy paper aims to analyze human development challenges in Indragiri Hulu Regency and formulate policy alternatives to sustainably improve the Human Development Index (HDI). The focus lies on increasing the value-added of agricultural products, diversifying the local economy, developing micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and enhancing access to markets and economic facilities all with the goal of strengthening community income, education, and health. The methodology employed integrates Bardach's (2012) comparative policy analysis with Dunn's (1999) approach, incorporating assessments of technical, economic, political, and administrative feasibility. It also examines the alignment of these initiatives with the 2025–2029 National Medium Term Development Plan (RPJMN), the Riau Province Medium-Term Development Plan (RPJMD), and the Indragiri Hulu Regency Medium Term Development Plan (RPJMD). The analysis indicates that the downstream processing of agricultural products and economic diversification are the most effective strategies for boosting the HDI; these approaches strengthen per capita income, expand employment opportunities, improve access to education and healthcare, and empower the community through MSMEs and agrotourism. Given its high feasibility, strong political backing, and alignment with national and regional development priorities, this policy is recommended as a key priority for enhancing the quality of life and HDI outcomes in Indragiri Hulu Regency.

Keywords: *Human Development Index, downstreaming of products, economic diversification, MSMEs, regional development*

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator keberhasilan pembangunan yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM penting bagi Kabupaten Indragiri Hulu karena kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan daya saing daerah.

Indragiri Hulu memiliki potensi besar pada sektor pertanian dan perkebunan, tetapi pemanfaatannya perlu didukung oleh SDM yang berkualitas. Keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja produktif masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

IPM Indragiri Hulu yang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau menunjukkan perlunya penguatan pembangunan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Karena itu, diperlukan kebijakan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas SDM, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Isu Strategis

Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Kabupaten Indragiri Hulu (72,75) masih di bawah rata-rata nilai IPM Provinsi Riau (75,67) data BPS Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.

Masalah

1) Pendidikan yang belum optimal (harapan & rata-rata lama sekolah rendah, (sumber data BPS Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024)
2) Standar hidup yang kurang layak (pengeluaran riil per kapita rendah),

(sumber data BPS Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024)

3) Akses kesehatan yang terbatas, (sumber data BPS Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024)
4) Interaksi faktor ekonomi dan sosial yang belum kuat. (sumber data BPS Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024)

Analisis Prioritas Masalah Pembangunan Manusia Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang memengaruhi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hulu, dilakukan analisis prioritas menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). Metode ini bertujuan untuk menentukan tingkat prioritas penanganan masalah berdasarkan tingkat urgensi, tingkat keparahan dampak, serta potensi perkembangan masalah apabila tidak segera ditangani.

Penilaian dilakukan menggunakan skala 1 sampai 5 pada masing-masing indikator.

Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Skor Total
Masalah 1	4	4	3	11
Masalah 2	5	5	4	14
Masalah 3	4	4	3	11
Masalah 4	3	3	3	9

Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan standar hidup yang kurang layak (pengeluaran riil per kapita rendah) memperoleh skor tertinggi yaitu 14, sehingga ditetapkan sebagai prioritas utama. Tingginya skor tersebut menunjukkan bahwa rendahnya daya beli masyarakat merupakan masalah yang sangat mendesak, berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat, serta berpotensi semakin memburuk apabila tidak segera diintervensi. Kondisi ini secara langsung memengaruhi dimensi standar hidup layak dalam IPM dan secara tidak langsung berdampak pada kemampuan masyarakat mengakses pendidikan dan layanan kesehatan.

Permasalahan kedua adalah pendidikan yang belum optimal (rendahnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah) dengan skor 11. Masalah ini memiliki tingkat urgensi dan dampak yang cukup tinggi karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Rendahnya capaian pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja serta kemampuan masyarakat meningkatkan pendapatan di masa mendatang.

Permasalahan ketiga adalah akses kesehatan yang terbatas, yang juga memperoleh skor 11. Keterbatasan fasilitas dan layanan kesehatan berdampak pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat serta berpengaruh terhadap umur harapan hidup sebagai salah satu komponen IPM. Apabila tidak ditangani secara komprehensif, kondisi ini dapat memperlambat peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sementara itu, interaksi faktor ekonomi dan sosial yang belum kuat memperoleh skor 9 dan berada pada prioritas berikutnya. Permasalahan ini bersifat struktural dan jangka panjang, yang memengaruhi efektivitas pembangunan secara menyeluruh. Meskipun tingkat urgensinya relatif lebih rendah dibandingkan permasalahan lainnya, penguatan sinergi antar sektor ekonomi dan sosial tetap diperlukan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi peningkatan IPM Kabupaten Indragiri Hulu perlu difokuskan terlebih dahulu pada peningkatan standar hidup masyarakat melalui penguatan ekonomi dan peningkatan daya beli. Upaya ini kemudian perlu diikuti dengan perbaikan kualitas pendidikan serta pemerataan layanan kesehatan. Pendekatan yang terintegrasi antar sektor diharapkan mampu mendorong percepatan peningkatan IPM sehingga dapat

mendekati atau melampaui rata-rata Provinsi Riau.

Penyebab Masalah Level 1

a. Dominasi sektor pertanian dan informal dengan pendapatan rata-rata yang relatif rendah; (Sri Hery Susilowati et al., Dinamika dan Struktur Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan di Berbagai Agroekosistem di Indonesia, Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 18 No. 2 (2020)
b. Proporsi besar pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pokok dasar; (publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) berjudul Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024.)
c. Kemiskinan yang tetap ada meskipun angkanya moderat; (BPS 2025)
d. Struktur belanja rumah tangga yang belum optimal untuk meningkatkan kualitas hidup. (http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/105889)

Penyebab Masalah Level 2

a. Ketergantungan pada Sektor Pertanian Primer; (https://karyailmiah.id/wp-content/uploads/publikasi/hei-publishing-indonesia/pengantar-ekonomi-pembangunan/1761274147)
b. Skala Usaha tergolong Kecil dan Minim Nilai Tambah;(PUBLIKa, Vol 2, No. 2 Hal. 216–233(2016))
c. Tingginya Proporsi Pekerja Informal; (Aulia & Dewi (2025). Pengaruh Pekerja Informal, IPM, dan Kredit BPR terhadap Kemiskinan di Indonesia — Jurnal Pendidikan Indonesia)
d. Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Keterampilan; (https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jeb)| Volume 21 No 1 June 2025)

Tabel 1. Faktor Rumah Tangga dan Pola Konsumsi

No.	Faktor/Indikator Permasalahan	Sumber Referensi
1	Pendapatan Rumah Tangga yang Relatif Rendah	BPS. PDRB Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Pengeluaran Tahun 2013–2017, khususnya data struktur pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hulu.
2	Tingginya Ketergantungan pada Konsumsi Pangan	Jurnal Dinamika Pertanian, Volume XXXIII, Nomor 1, April 2017, hlm. 29–38.
3	Rendahnya Akses terhadap Barang dan Jasa Non-Pokok	BPS. (2025). Statistik Harga Konsumen Perdesaan Kelompok Non Makanan 2024 (Rural Consumer Price Statistics Non-Food Groups 2024), Volume 15.
4	Beban Tanggungan Rumah Tangga yang Tinggi	Jambura Journal of Food Technology (JJFT), Volume 7, Nomor 3, Tahun 2025.

Sumber : Data diolah 2026

Tabel 2. Faktor Struktural dan Kondisi Ekonomi

No.	Faktor/Indikator Permasalahan	Sumber Referensi
1	Struktur Ekonomi Berbasis Sektor Berpendapatan Rendah	Jurnal Agribisnis, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2025. Artikel: Analisis Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Wilayah dan Sektor di Kabupaten Indragiri Hulu.
2	Kerentanan terhadap Fluktuasi Harga dan Krisis Ekonomi	Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen, Volume 2, Nomor 4, Tahun 2025. Artikel: Analisis Faktor-Faktor Kerentanan dan Strategi Ketahanan Ekonomi Indonesia Menghadapi Krisis Global.
3	Rendahnya Akses terhadap Pekerjaan Formal	Jurnal Ketenagakerjaan, Volume 19, Nomor 3, Tahun 2024. Penelitian mengenai Working Poverty (pekerja yang bekerja namun tetap berada dalam kondisi miskin) menggunakan data Susenas.
4	Kualitas Sumber Daya Manusia yang Masih Terbatas	Abram & Yeniwati. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Korupsi dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan di Indonesia. Vol. 3, No. 3 (2021).
5	Ketimpangan Distribusi Pendapatan	Jurnal Ekonomi Kiat UIR Riau, Volume 35, Nomor 1, Juni 2024. Artikel: Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Riau.

Sumber : Data diolah 2026

Tabel 3. Faktor Perilaku Ekonomi dan Akses Kesejahteraan

No.	Faktor/Indikator Permasalahan	Sumber Referensi
1	Dominasi Pengeluaran Konsumtif Jangka Pendek	Jurnal Agribisnis, Volume 22, Nomor 2, Desember 2020. Artikel: Kecenderungan Mengkonsumsi Marjinal Masyarakat di Provinsi Riau.

2	Rendahnya Literasi Keuangan Rumah Tangga	Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam. Artikel: Pengaruh Literasi Keuangan dan Pendapatan Perkapita terhadap Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia: Analisis Ekonomi Islam, hlm. 20–35.
3	Pola Konsumsi yang Kurang Produktif	Jurnal Agribisnis, Volume 22, Nomor 2, Desember 2020. Artikel: Kecenderungan Mengkonsumsi Marjinal Masyarakat di Provinsi Riau.
4	Keterbatasan Akses terhadap Layanan Berkualitas	JKEP: Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Volume 2, Nomor 3, September 2020, hlm. 63–68. Artikel: Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Bantuan Sosial dan Kesehatan, Konsumsi Rumah Tangga dan Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

Sumber : Data diolah 2026

Akar Masalah

1) Standar hidup yang kurang layak (pengeluaran riil per kapita rendah), (sumber data BPS Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024)
2) Dominasi sektor pertanian dan informal dengan pendapatan rata-rata yang relatif rendah; (Sri Hery Susilowati et al., Dinamika dan Struktur Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan di Berbagai Agroekosistem di Indonesia, Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 18 No. 2 (2020)
3) Ketergantungan pada Sektor Pertanian Primer; (https://karyailmiah.id/wp-content/uploads/publikasi/hei-publishing-indonesia/pengantar-ekonomi-pembangunan/1761274147)

Rumusan Masalah (Problem Statement)

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hulu yang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau menunjukkan adanya tantangan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia. Kondisi ini dipengaruhi oleh standar hidup masyarakat yang kurang layak, tercermin dari rendahnya pengeluaran riil per kapita. Selain itu, struktur perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor pertanian dan sektor informal dengan pendapatan rata-rata relatif rendah turut membatasi daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Tingginya ketergantungan pada sektor pertanian primer yang memiliki nilai tambah terbatas dan rentan terhadap fluktuasi eksternal semakin memperkuat stagnasi pendapatan. Akibatnya, upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan percepatan perbaikan IPM menjadi terhambat tanpa adanya transformasi dan diversifikasi ekonomi yang lebih produktif.x

METODE

Penelitian ini menggunakan analisis kebijakan komparatif Bardach (2012) dan pendekatan Dunn (1999). Analisis dilakukan melalui identifikasi masalah, perumusan dan perbandingan alternatif kebijakan, serta penilaian kelayakan teknis, ekonomi, politik, dan administratif. Alternatif kebijakan kemudian dinilai menggunakan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Analisis juga memperhatikan keselarasan kebijakan dengan RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi Riau, dan RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu.

HASIL

Dukungan Konseptual dan Kebijakan Nasional

Peningkatan IPM Kabupaten Indragiri Hulu didukung oleh berbagai regulasi nasional, antara lain UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 1 Tahun 2024, dan Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Regulasi tersebut menjadi dasar perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas pembangunan manusia melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

Teori tentang IPM

Peningkatan IPM merupakan proses multidimensi yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Human Capital Theory (Schultz, 1961; Becker, 1964) menegaskan bahwa pendidikan,

kesehatan, dan keterampilan meningkatkan produktivitas serta pendapatan. Pendekatan Keynesian Human Development menekankan pentingnya peran pemerintah melalui layanan publik, kebijakan fiskal, subsidi, dan penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, pendekatan pembangunan manusia menekankan keterpaduan kebijakan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi.

Dalam konteks Indragiri Hulu, penerapannya dapat dilakukan melalui hilirisasi pertanian, diversifikasi ekonomi, penguatan UMKM, peningkatan layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat.

Standar Hidup yang Kurang Layak

Standar hidup dalam IPM salah satunya diukur melalui pengeluaran riil per kapita, yang menggambarkan kemampuan konsumsi masyarakat berdasarkan daya beli. Pengeluaran per kapita Indragiri Hulu yang relatif rendah menunjukkan bahwa kemampuan konsumsi masyarakat masih terbatas dan dapat memengaruhi capaian IPM.

Peningkatan standar hidup perlu dilakukan melalui penguatan UMKM, akses modal dan pasar, pelatihan, kewirausahaan, serta perlindungan sosial seperti bantuan pangan dan PKH. Peningkatan pendapatan dan daya beli diharapkan memperbaiki akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan.

Dominasi Sektor Pertanian dan Informal

Perekonomian Indragiri Hulu masih didominasi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, dengan pengolahan produk yang relatif terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat belum optimal.

Terbatasnya industri dan jasa modern juga membuat sebagian tenaga kerja masih bergantung pada pertanian skala kecil dan sektor informal yang produktivitas serta pendapatannya relatif rendah. Keterbatasan modal, teknologi, keterampilan, dan akses pasar semakin memperkuat kondisi tersebut.

Ketergantungan pada Pertanian Primer

Komoditas seperti kelapa sawit, karet, dan pangan menjadi penopang utama ekonomi daerah. Namun, ketergantungan pada komoditas primer menyebabkan pendapatan masyarakat rentan terhadap fluktuasi harga dan rendahnya nilai tambah karena sebagian produk masih dijual dalam bentuk mentah.

Karena itu, diperlukan hilirisasi dan diversifikasi ekonomi melalui pengolahan komoditas, penguatan kelompok tani dan koperasi, pengembangan UMKM, kemitraan usaha, serta peningkatan teknologi dan keterampilan. Optimalisasi lahan pertanian, termasuk lahan rawa, juga dapat mendukung peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan.

PEMBAHASAN

Alternatif Kebijakan

Policy Paper ini menghasilkan alternatif kebijakan sebagai berikut :

a) Pilihan Kebijakan untuk Meningkatkan Standar Hidup

Peningkatan standar hidup masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan layanan dasar. Perlindungan sosial diperkuat melalui PKH, bantuan pangan, pemutakhiran data kesejahteraan, dan edukasi pengelolaan keuangan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kemandirian.

Pemberdayaan ekonomi diarahkan pada penguatan UMKM, BUMDes, koperasi, akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, dan pemasaran digital, serta perluasan lapangan kerja non-pertanian dan akses pasar. Di sisi lain, layanan dasar ditingkatkan melalui perbaikan kualitas pendidikan, akses kesehatan, imunisasi, sanitasi, dan perlindungan kelompok rentan. Integrasi kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, daya beli, kualitas hidup, dan pada akhirnya mendukung peningkatan IPM Kabupaten Indragiri Hulu.

Agar seluruh kebijakan berjalan efektif, diperlukan koordinasi lintas perangkat daerah melalui TKPK, pemanfaatan data BPS dan data kesejahteraan sebagai dasar kebijakan, monitoring dan evaluasi berkala, serta penguatan peran pemerintah desa melalui APBDes dalam mendukung program ekonomi produktif dan pemberdayaan masyarakat.

b) Evaluasi Alternatif Kebijakan dengan Metode Bardach (2012)

Berdasarkan metode Bardach, terdapat tiga alternatif kebijakan. Perlindungan sosial terpadu efektif mengurangi beban masyarakat rentan melalui bantuan pangan, pendidikan, dan kesehatan, tetapi dampaknya terhadap kemandirian ekonomi jangka panjang terbatas.

Pemberdayaan ekonomi lokal dan lapangan kerja produktif melalui UMKM, BUMDes, koperasi, pelatihan, dan pembiayaan dapat meningkatkan pendapatan serta menciptakan pekerjaan, meskipun membutuhkan modal dan pendampingan.

Sementara itu, penguatan layanan dasar dan sosial melalui pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur meningkatkan kualitas hidup dan SDM dalam jangka panjang, tetapi dampak langsung terhadap pendapatan relatif terbatas.

Berdasarkan analisis Bardach (2012), pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan lapangan kerja produktif menjadi pilihan utama karena mampu meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, mendorong diversifikasi ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian primer. Kebijakan ini secara langsung mendukung peningkatan daya beli, standar hidup, dan IPM.

c) Kebijakan Mengatasi Ketergantungan pada Pertanian Primer

Kabupaten Indragiri Hulu masih bergantung pada pertanian primer dan sektor informal sehingga nilai tambah, pendapatan, dan kesempatan kerja non-pertanian masih terbatas. Kebijakan diarahkan pada hilirisasi, diversifikasi ekonomi, penguatan kelembagaan, pembiayaan, akses pasar, dan peningkatan keterampilan**.**

Strategi yang dilakukan meliputi penguatan kelembagaan petani melalui gapoktan, koperasi, dan kelompok ekonomi petani untuk meningkatkan akses modal, pasar, dan posisi tawar. Hilirisasi produk pertanian diarahkan pada pengolahan sawit, karet, dan pangan melalui IKM dan BUMDes agar menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan.

Selanjutnya, diversifikasi ekonomi desa dilakukan melalui pengembangan IKM, makanan olahan, kerajinan, jasa, agrowisata, dan ekonomi digital untuk memperluas sumber pendapatan masyarakat. Upaya tersebut didukung akses pembiayaan produktif bagi petani dan UMKM, perluasan pasar melalui pemasaran digital dan jaringan perdagangan, serta peningkatan keterampilan melalui pelatihan vokasi, kewirausahaan, teknologi, dan pemasaran, khususnya bagi generasi muda.

d) Evaluasi Kebijakan dengan Metode Bardach (2012)

Evaluasi menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan petani mampu meningkatkan kapasitas dan posisi tawar, tetapi dampaknya terbatas tanpa dukungan hilirisasi dan pasar. Akses modal dapat mempercepat pengembangan usaha, namun memiliki risiko kredit dan membutuhkan pendampingan.

Penguatan akses pasar meningkatkan penjualan dan pendapatan, tetapi memerlukan dukungan teknologi dan logistik.

Sementara itu, pendidikan dan pelatihan meningkatkan keterampilan serta peluang kerja, meskipun dampaknya membutuhkan waktu.

Hilirisasi produk dan diversifikasi ekonomi menjadi kebijakan terbaik karena mampu meningkatkan nilai tambah, pendapatan, lapangan kerja, dan ketahanan ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan pada sektor primer. Kebijakan ini juga dapat mengintegrasikan

kelembagaan, pembiayaan, pasar, dan peningkatan keterampilan.

Tiga Kebijakan Prioritas

Berdasarkan analisis Bardach tiga kebijakan yang menjadi prioritas adalah:

1. **Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan Lapangan Kerja Produktif**
   Fokus pada penguatan UMKM, BUMDes, koperasi, keterampilan, pembiayaan, dan penciptaan lapangan kerja non-pertanian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada sektor informal.
2. **Hilirisasi Produk dan Diversifikasi Ekonomi**
   Fokus pada pengolahan komoditas lokal, pengembangan IKM, UMKM, agrowisata, ekonomi kreatif, dan jasa agar struktur ekonomi desa lebih beragam dan bernilai tambah.
3. **Hilirisasi Produk Pertanian**
   Fokus pada pengolahan komoditas unggulan seperti sawit, karet, dan pangan agar tidak hanya dijual sebagai bahan mentah. Kebijakan ini meningkatkan nilai tambah, pendapatan petani, dan daya saing produk lokal.

Evaluasi dengan Kriteria Dunn (1999)

Berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan**,** hilirisasi dan diversifikasi ekonomi merupakan alternatif paling komprehensif dibandingkan pemberdayaan ekonomi lokal dan hilirisasi pertanian secara terbatas.

Kebijakan ini efektif meningkatkan nilai tambah, pendapatan, dan lapangan kerja; efisien karena memanfaatkan potensi lokal; cukup karena menyentuh akar ketergantungan pada sektor primer; merata karena melibatkan petani, UMKM, dan masyarakat desa; responsif terhadap kebutuhan pendapatan dan pekerjaan; serta tepat dengan struktur ekonomi Indragiri Hulu.

Hilirisasi dan diversifikasi juga menciptakan efek pengganda melalui berkembangnya pertanian, industri pengolahan, perdagangan, transportasi, logistik, dan jasa. Dengan demikian, kebijakan ini menjadi strategi yang lebih berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan, memperkuat struktur ekonomi, dan mendukung peningkatan IPM Kabupaten Indragiri Hulu.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, strategi peningkatan IPM di Kabupaten Indragiri Hulu diarahkan pada penguatan struktur ekonomi daerah melalui hilirisasi produk dan diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, dan pengembangan UMKM. Namun demikian, upaya hilirisasi dan diversifikasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai permasalahan struktural, seperti rendahnya nilai tambah komoditas, keterbatasan kapasitas SDM, serta belum optimalnya pengembangan sektor non-primer. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan dalam makalah ini difokuskan pada kebijakan substantif yang mendorong hilirisasi produk dan diversifikasi ekonomi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan pada akhirnya mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Indragiri Hulu.

Secara prosedural, kebijakan ini merupakan Keputusan Bupati Indragiri Hulu, diwujudkan melalui Peraturan Bupati tentang Pengembangan Hilirisasi dan Diversifikasi Ekonomi Daerah serta Surat Edaran Bupati tentang Percepatan Implementasi Program Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Lokal. Kebijakan ini diharapkan dapat menguatkan nilai tambah komoditas pertanian, mengembangkan UMKM, kerajinan lokal, dan agrowisata, sekaligus menjadi dasar koordinasi antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi Riau, dan

kementerian/lembaga terkait. Penyusunan Regulasi ini melibatkan perangkat daerah terkait, camat, dan kepala desa untuk memastikan pelaksanaan terpadu dan efektif. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2024, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan ekonomi lokal tetapi juga mendorong peningkatan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat sebagai komponen utama IPM.

Kebijakan ini menjawab pernyataan masalah yang telah disampaikan pada bab sebelumnya karena melalui hilirisasi produk dan diversifikasi ekonomi, nilai tambah komoditas pertanian meningkat, UMKM dan kerajinan lokal berkembang, serta peluang agrowisata dimanfaatkan secara optimal. Peningkatan aktivitas ekonomi ini membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, yang pada gilirannya memperbaiki akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup layak. Dengan demikian, perbaikan dimensi pendapatan, pendidikan, dan kesehatan ini secara langsung mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat secara berkelanjutan.

Cara kebijakan ini menyelesaikan masalah adalah dengan mengintegrasikan program hilirisasi produk dan diversifikasi ekonomi pada tiap tingkatan pemerintahan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, mendorong pengembangan UMKM non-pertanian, kerajinan lokal, dan agrowisata. Integrasi program ini membuka peluang kerja baru, meningkatkan keterampilan dan kapasitas SDM melalui pelatihan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, peningkatan pendapatan, pengetahuan, dan kesehatan masyarakat akan terwujud secara simultan, yang pada akhirnya mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indragiri Hulu secara berkelanjutan.

Dalam implementasinya, kebijakan peningkatan IPM di Kabupaten Indragiri Hulu melalui hilirisasi produk dan diversifikasi ekonomi diarahkan dengan memanfaatkan program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang sesuai dengan potensi daerah, seperti pengembangan industri pengolahan kelapa sawit dan karet, penguatan UMKM, serta peningkatan produktivitas pertanian bernilai tambah. Selain itu, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan layanan kesehatan juga menjadi bagian penting. Program-program ini dilaksanakan melalui sinergi dengan kementerian/lembaga terkait guna mendukung peningkatan IPM secara berkelanjutan.

Secara operasional, peningkatan IPM di Kabupaten Indragiri Hulu melalui hilirisasi dan diversifikasi ekonomi dilakukan melalui kerja sama pemerintah daerah dengan pelaku industri, UMKM, dan lembaga keuangan dalam pengembangan industri pengolahan, penguatan rantai pasok, serta akses pembiayaan. Intervensi juga mencakup pelatihan vokasi, digitalisasi usaha, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, program CSR dari perusahaan seperti PT Inecda Plantations dan PT Mega Nusa Inti Sawit dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM. Pemerintah daerah berperan memastikan perencanaan terintegrasi, dukungan infrastruktur, serta sinergi pendanaan dengan pemerintah pusat agar implementasi program efektif dalam meningkatkan IPM.

Penguatan hilirisasi komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan

hortikultura, serta diversifikasi ekonomi ke UMKM, kerajinan lokal, dan agrowisata, diharapkan meningkatkan IPM Kabupaten Indragiri Hulu dengan menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memperbaiki pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan ini akan memudahkan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan konsumsi yang lebih berkualitas, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup dan capaian Indeks Pembangunan Manusia di daerah.

SIMPULAN

Peningkatan IPM Kabupaten Indragiri Hulu perlu diarahkan pada penguatan standar hidup, pendidikan, dan kesehatan melalui strategi yang terintegrasi. Hasil analisis USG menunjukkan bahwa standar hidup yang kurang layak merupakan prioritas utama, sedangkan dominasi sektor pertanian primer dan rendahnya nilai tambah menjadi akar persoalan ekonomi yang perlu ditangani. Berdasarkan evaluasi Bardach (2012) dan Dunn (1999), hilirisasi produk dan diversifikasi ekonomi merupakan alternatif paling komprehensif karena dapat meningkatkan nilai tambah, pendapatan, lapangan kerja, dan daya saing sekaligus mengurangi ketergantungan pada sektor primer. Implementasinya perlu diperkuat melalui pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan UMKM, kelembagaan petani, akses pembiayaan dan pasar, peningkatan keterampilan, serta sinergi lintas sektor. Dengan pelaksanaan yang terintegrasi dan berkelanjutan, strategi tersebut direkomendasikan sebagai kebijakan utama untuk mendorong IPM Kabupaten Indragiri Hulu mendekati dan melampaui rata-rata Provinsi Riau.

DAFTAR RUJUKAN

Abram, & Yeniwati. (2021). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, korupsi dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2015). Program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP). Jakarta: Kementerian Pertanian.

Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment, interest and money. London, UK: Macmillan.

Nurkse, R. (1953). Problems of capital formation in underdeveloped countries. Oxford, UK: Basil Blackwell.

Oxford Poverty & Human Development Initiative & UNDP. (2010). Multidimensional poverty index 2010: Technical notes. Oxford, UK: OPHI.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Sinergi Pendanaan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029.

Pemerintah Provinsi Riau. (2025). Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2025–2045. Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development (12th ed.). Harlow, UK: Pearson Education Limited.

Susanti, R., & Nugroho, H. (2021). Pengaruh hilirisasi produk pertanian terhadap pendapatan petani di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 19(2), 45–58. https://doi.org/xxxx

Susilowati, S. H., et al. (2020). Dinamika dan struktur pendapatan rumah tangga perdesaan di berbagai agroekosistem di Indonesia. Analisis Kebijakan Pertanian, 18(2), 12–30.

Suryahadi, A., & Sumarto, S. (2015). Strategi pengentasan kemiskinan berbasis diversifikasi ekonomi di pedesaan Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16(1), 1–18. https://doi.org/xxxx

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Keputusan Menko PMK Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia